BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

1.1. Tinjauan Pustaka

1.1.1. Pengertian Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa Latin *Coopere* atau dalam bahasa Inggris *Cooperation*, secara etimologi didefinisikan *co* yang berarti bersama dan *operation* yang artinya bekerja atau berusaha. Jadi *Cooperation* adalah bekerja bersama – sama atau usaha bersama untuk mencapai kepentingan yang sama.

Menurut UU No.25 Tahun 1922 tentang Koperasi menjelaskan “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan”.

Menurut Menteri Koperasi dan UKM menjelaskan bahwa koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam koperasi merupakan lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi lain, dana tau anggotanya yang perlu dikelola secara professional sesuai dengan prinsip kehati – hatian.

Hasmawati (2003 : 3) mengemukakan bahwa Koperasi adalah suatu badan usaha bersama diantara orang – orang yang mempunyai kepentingan bersama, yang dijalankan dan dikelola bersama berdasarkan asas kekeluargaan (Hasmawati, 2013).

Subandi (2011 : 18 – 19) menjelaskan “Koperasi ialah suatu kumpulan orang, yang biasanya memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas, melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawali secara demokratis, masing – masing memberikan sumbangan setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia

menanggung resiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan” (Subandi, 2017, pp. 18 - 19).

Dengan demikian dapat disimpulkan pengertian koperasi yakni badan usaha perseorangan, kelompok atau badan hukum koperasi, yang kegiatan usaha nya dilakukan dengan bekerja sama antar anggota untuk mencapai tujuan yang sama dan berasaskan kekeluargaan. Jenis dan usaha yang dijalankan oleh koperasi pun berbeda – beda. Menurut (Sudarsono & Edilius, 2004, p. 29) koperasi dibedakan menurut aneka ragam unit usaha nya yaitu :

1. Koperasi usaha tunggal (*single purpose*), memberikan pelayanan atau usaha dengan hanya satu jenis usaha atau satu bidang kegiatan saja.
2. Koperasi usaha majemuk (*multi purpose*), koperasi ini menyediakan pelayanan yang beragam dan memiliki fungsi yang terintegrasi.

Berdasarkan jenisnya koperasi yang ada di Indonesia dibagi menjadi 4 (empat) diantaranya :

1. Koperasi konsumsi, koperasi yang menyelenggarakan fungsi pembelian atau pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.
2. Koperasi produksi, koperasi ini merupakan koperasi yang menghasilkan barang dan jasa, dimana anggotanya bekerja sebagai pegawai atau karyawan koperasi. Dalam kata lain, koperasi ini menjual produk dari para anggotanya.
3. Koperasi simpan pinjam, koperasi ini memiliki usaha tunggal yakni menghimpun dana simpanan anggota dan menyalurkan jasa berupa pinjaman kepada anggota.
4. Koperasi serba usaha, yaitu koperasi yang menyediakan jasa simpan pinjam dan perdagangan bagi para anggota maupun luar anggota.

Di dalam koperasi kekuasaan tertinggi berada di rapat anggota, di dalam rapat anggota para anggota dapat berbicara mengemukakan pendapatnya, memberikan

usul dan pertimbangan, menyetujui usul serta dapat menolaknya, dan memberikan masukan atau himbauan yang berhubungan dengan koperasi. Rapat anggota biasanya dilaksanakan satu tahun sekali di akhir periode koperasi, bertujuan untuk mengevaluasi kinerja koperasi selama satu periode.

1.1.2. Koperasi simpan pinjam

1.1.2.1. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Menurut Suryanto dan Nurhadi (2003 : 43), koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan kegiatan kredit berbunga rendah (Suryanto & Nurhadi, 2003, p. 43).

Adapun pengertian koperasi simpan pinjam berdasarkan PSAK 27/Reformat 2007, koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatan jasa utamanya menyediakan jasa penyimpanan dan peminjaman untuk anggotanya.

Menurut Subandi (2017 : 35) Koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bergerak dalam pemupukan simpanan dari para anggotanya untuk dipinjamkan kembali kepada anggotanya yang membutuhkan bantuan modal untuk usahanya. Selain itu, koperasi simpan pinjam juga bertujuan mendidik anggotanya untuk bersifat hemat dan gemar menabung serta menghindarkan anggotanya dari jeratan para rentenir (Subandi, 2017, p. 35).

Dapat disimpulkan bahwa koperasi simpan pinjam adalah sebuah lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang jasa simpanan dan pinjaman dengan menghimpun dana dari para anggotanya dan menyalurkan kembali kepada para anggota dengan bunga kredit yang rendah guna meningkatkan kesejahteraan para anggotanya.

1.1.2.2 Kegiatan Usaha Koperasi Simpan Pinjam

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi, menyebutkan bahwa kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan

menyalurkannya kembali melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari anggota dan untuk anggota koperasi itu sendiri, maupun untuk calon anggota (Pemerintah Republik Indonesia, 1995).

Jadi kegiatan utama koperasi simpan pinjam yakni menghimpun dana dari para anggota dan menyalurkan dana tersebut kepada anggota maupun calon anggota dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama.

1.1.3. Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian terhadap kesehatan koperasi guna mengukur atau menilai kinerja koperasi, sehingga koperasi dapat mengambil keputusan atau langkah selanjutnya yang lebih baik. Penilaian berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.MUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah No.20/Per/M.KUKM/XI/2008 dan peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementrian Koperasi dan UMKM No.06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi. Analisis kesehatan ini dilakukan dengan menilao indikator – indikator yang yang sudah ditentukan dalam peraturan tersebut, untuk mmenunjukkan kinerja koperasi dinyatakan sehat, cukup sehat atau tidak sehat. Indikator tersebut diantaranya :

1. Permodalan

Permodalan adalah dana yang akan digunakan untuk melaksanakan kegiatan usaha. Pada dasarnya modal ialah hal utama dalam menjalankan usaha, semakin baik permodalan dalam suatu perusahaan maka semakin baik juga kinerja perusahaan tersebut dan semakin mudah perusahaan tersebut mengembangkan usaha nya.

Dalam UU No.25 Tahun 1992 pasal 41, modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan pinjaman. Modal bersumber dari simpanan pokok, simpanan wajib para anggota, dana cadangan dan dana hibah. Simpanan pokok disini wajib dibayarkan

oleh para anggota pada saat masuk menjadi anggota koperasi, dan simpanan wajib ini dibayarkan oleh anggota tiap bulan yang besarnya ditentukan pada rapat anggota tahunan.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia No.14/Per/M.MUKM/XII/2009, menjelaskan :

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Untuk memperoleh rasio antara modal sendiri terhadap total asset ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio antara modal sendiri dengan total asset lebih kecil atau sama dengan 0% diberikan nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 4% mulai dari 0% nilai ditambah 5 dengan maksimum nilai 100.
- 3) Untuk rasio lebih besar dari 60% sampai rasio 100% setiap kenaikan rasio 4% dikurangi 5.
- 4) Nilai dikalikan bobot sebesar 6% diperoleh skor permodalan

Tabel 2.1
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Asset

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
$0 \leq x < 20$	25	6	1.50
$20 \leq x < 40$	50	6	3.00
$40 \leq x < 60$	100	6	6.00
$60 \leq x < 80$	50	6	3.00
$80 \leq x < 100$	25	6	1.50

Sumber : Peraturan Menteri KUKM
No.14/Per/MKUKM/XII/2009

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko

Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang beresiko lebih kecil atau sama dengan 0% diberi nilai 0.
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio 1% mulai dari 0%, nilai ditambah 1 dengan nilai maksimum 100.
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 6%, maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 2.2
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Beresiko

Rasio Modal (dalam %)	Nilai	Bobot (dalam %)	Skor
$0 < x < 10$	0	6	0
$10 < x < 20$	10	6	0,6
$20 < x < 30$	20	6	1,2
$30 < x < 40$	30	6	1,8
$40 < x < 50$	40	6	2,4
$50 < x < 60$	50	6	3,0
$60 < x < 70$	60	6	3,6
$70 < x < 80$	70	6	4,2
$80 < x < 90$	80	6	4,8
$90 < x < 100$	90	6	5,4
≥ 100	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

- 1) Rasio kecukupan modal sendiri adalah perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) dikalikan dengan 100%.
- 2) Modal tertimbang adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen modal KSP/USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.
- 3) ATMR adalah jumlah dari hasil kali setiap komponen aktiva KSP dan USP koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuan risiko.

- 4) Menghitung nilai ATMR dilakukan dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing – masing komponen aktiva.
- 5) Rasio kecukupan modal sendiri dapat dihitung/diperoleh dengan cara membandingkan nilai modal tertimbang dengan nilai ATMR dikalikan dengan 100%.

Tabel 2.3
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 4	0	3	0.00
$4 < x \leq 6$	50	3	1.50
$6 < x \leq 8$	75	3	2.25
> 8	100	3	3.00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

2. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva produkti merupakan kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi. Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 4 (empat) rasio, yakni :

- A. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan mengukur rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Standar Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	0	10	0,00
$25 < x < 50$	50	10	5,00
$50 < x < 75$	75	10	7,50
> 75	100	10	10,00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

B. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman Yang Diberikan

Pinjaman bermasalah terdiri dari pinjaman kurang lancar, pinjaman yang diragukan dan pinjaman yang macet. Kriteria pinjaman bermasalah sebagai berikut :

1) Pinjaman Kurang Lancar

Pinjaman digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria dibawah ini :

- a. Pengembalian pinjaman dilakukan dengan angsuran yaitu :
 - a) Terdapat tunggakan angsuran pokok sebagai berikut :
 - Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi pinjaman dengan angsuran harian dan/atau mingguan; atau
 - Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, 2 (dua) bulan atau 3 (bulan); atau
 - Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 (dua belas) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulan atau lebih; atau
 - b) Terdapat tunggakan bunga sebagai berikut :
 - Tunggakan melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan; atau
 - Melampaui 3 (tiga) bulan, tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan bagi pinjaman yang masa angsurannya lebih dari 1 (satu) bulan.
- b. Pengembalian pinjaman tanpa angsuran yaitu :
 - Pinjaman belum jatuh tempo
Terdapat tunggakan bunga yang melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan.
 - Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan.

2) Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman yang tergolong diragukan apabila pinjaman yang bersangkutan tidak memenuhi kriteria kurang lancar, tetapi berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa :

- a. Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang – kurangnya 75% dari hutang peminjam termasuk bunganya; atau
- b. Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai sekurang – kurangnya 100% dari hutang peminjam termasuk bunganya.

3) Pinjaman Macet

Pinjaman digolongkan macet apabila :

- a. Tidak memenuhi kriteria kurang lancar dan diragukan; atau
- b. Memenuhi kriteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan.
- c. Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri atau telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

Untuk memperoleh rasio antara risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Menghitung perkiraan besarnya risiko pinjaman bermasalah (RPM) sebagai berikut :
 - 1) 50% dari pinjaman yang diberikan yang kurang lancar (PKL).
 - 2) 75% dari pinjaman diberikan yang diragukan (PDR).
 - 3) 100% dari pinjaman yang macet (PM).
- b. Hasil penjumlahan tersebut dibagi dengan pinjaman yang disalurkan.
- c. Perhitungan penilaian :

- 1) Untuk rasio 45% atau lebih diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap penurunan rasio 1% dari 45% nilai ditambah 2, dengan maksimum nilai 100;
- 3) Nilai dikalikan dengan bobot 5% dan diperoleh skor.

Tabel 2.5
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 45	0	5	0
$40 < x \leq 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
$= 0$	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Menteri KUKM
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

C. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Untuk memperoleh rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio 0% berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan maka diberi nilai 0;
- 2) Untuk setiap kenaikan 1% mulai dari 0% nilai ditambah 1 sampai dengan maksimum 100;
- 3) Nilai dikalikan bobot sebesar 5% dan diperoleh skor.

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Resiko Terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
-----------	-------	-----------	------

0	0	5	0
$0 < x \leq 10$	10	5	0,5
$10 < x \leq 20$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	30	5	1,5
$30 < x \leq 40$	40	5	2,0
$40 < x \leq 50$	50	5	2,5
$50 < x \leq 60$	60	5	3,0
$60 < x \leq 70$	70	5	3,5
$70 < x \leq 80$	80	5	4,0
$80 < x \leq 90$	90	5	4,5
$90 < x \leq 100$	10	5	5,0

Sumber : Peraturan Menteri KUKM
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

- D. Rasio Pinjaman yang Beresiko terhadap Pinjaman yang Diberikan
Rasio pinjaman yang beresiko terhadap pinjaman yang diberikan diatur dengan ketentuan sebagai berikut :

Tabel 2.7
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Beresiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 - < 26	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

3. Penilaian Manajemen

Manajemen koperasi ialah suatu proses mencapai tujuan melalui usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan sebagaimana prinsip koperasi itu sendiri Penilaian aspek manajemen KSP dan USP koperasi meliputi lima komponen sebagai berikut :

- 1) Manajemen umum,
- 2) Kelembagaan,
- 3) Manajemen permodalan,
- 4) Manajemen Aktiva,
- 5) Manajemen likuiditas.

Tingkat kesehatan koperasi diperhitungkan dari nilai yang didasarkan kepada hasil penilaian dari jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut :

- 1) Manajemen umum 12 (dua belas) pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai untuk setiap jawaban “ya”).
- 2) Kelembagaan 6 (enam) pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 3) Manajemen permodalan 5 (lima) pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 4) Manajemen aktiva 10 (sepuluh) pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan “ya”).
- 5) Manajemen likuiditas 5 (lima) pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai untuk setiap jawaban pertanyaan).

Standar penilaian aspek manajemen KSP dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50

4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel 2.10
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel 2.11
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

Tabel 2.12
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM
No.14/Per/M.KUKM/XII/2009

4. Penilaian Efisiensi

Efisiensi adalah suatu ukuran keberhasilan yang dinilai dari segi besarnya sumber atau biaya untuk mencapai hasil dari kegiatan yang dijalankan. Penilaian ini meliputi kemampuan koperasi dalam melayani anggotanya dengan penggunaan asset dan biaya seefisien mungkin.

Penilaian efisiensi KSP/USP koperasi didasarkan pada 3 (tiga) rasio, yaitu :

a) Rasio beban operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto.

Cara perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio dengan atau lebih besar dari 100 diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 95% hingga lebih kecil dari 100% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio sebesar 5% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.
- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% dan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.13
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Pelayanan
terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
$0 \leq x < 90$	100	4	4

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

b) Rasio Beban Usaha Terhadap SHU kotor

Rasio ini ditetapkan sebagai berikut :

- 1) Untuk rasio lebih dari 80% diberi nilai 25 dan untuk setiap penurunan rasio 20% nilai ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai 100.

- 2) Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 4% dan didapatkan skor penilaian.

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha
terhadap SHU Kotor

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x < 80$	50	4	2
$40 < x < 60$	75	4	3
$0 < x < 40$	100	4	4

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

- 3) Rasio efisiensi pelayanan perhitungan rasio efisiensi pinjaman dihitung dengan membandingkan biaya karyawan dengan volume pinjaman, dan diterapkan sebagai berikut :
- Untuk rasio lebih dari 15% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 10% hingga 15% diberi nilai 50, selanjutnya setiap penurunan rasio 1% nilai ditambah 5 sampai dengan maksimum nilai 100.
 - Nilai dikalikan dengan bobot sebesar 2% dan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	100	2	2,0
$5 < x \leq 10$	75	2	1,5
$10 < x \leq 15$	50	2	1,0
> 5	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

5. Penilaian Likuiditas

Perhitungan aspek likuiditas menyangkut kemampuan Koperasi Simpan Pinjam dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSP dan USP Koperasi dilakukan terhadap 2 rasio, diantaranya

Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar, dan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.

1) Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Menurut Martini (2012), Kas adalah asset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan (Martini, 2012, p. 180).

Dan menurut Tatik Suryani (2008) menyebutkan bahwa Kas adalah alat pembayaran milik KSP/USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP/USP, sedangkan Bank adalah sisa rekening milik KSP/USP yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum KSP/USP (Suryani, 2008).

Pengukuran Rasio Kas dan Bank terhadap kewajiban lancar ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kas lebih besar dari 10% hingga 15% diberi nilai 100, untuk rasio lebih kecil dari 15% sampai dengan 20% diberi nilai 50, untuk rasio lebih kecil atau sama dengan 10% diberi nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% diberi nilai 25.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 10% dan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Kas
Terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 10	25	100	2,5
10 < x < 15	100	100	10
15 < x < 20	50	100	5
> 20	25	100	2,5

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

2) Pengukuran Rasio Pinjaman Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Pengukuran rasio pinjaman diberikan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio pinjaman lebih kecil lebih kecil dari 60% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 10% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 5% dan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
60 < x < 70	50	5	2,50
70 < x < 80	75	5	3,75
80 < x < 90	100	5	5

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, menjelaskan bahwa “Kemandirian dan pertumbuhan koperasi merujuk pada bagaimana kemampuan koperasi dalam melayani masyarakat secara mandiri dan seberapa besar pertumbuhan koperasi di tahun yang bersangkutan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya”.

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 rasio, yakni :

1) Rasio rentabilitas asset

Rasio rentabilitas asset yaitu SHU sebelum pajak dibandingkan dengan total asset, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilas asset lebih kecil dari 5% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.

- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.18
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Asset

Rasio Rentabilitas Asset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 5	25	3	0,75
$5 \leq x \leq 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x \leq 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

2) Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total modal sendiri, perhitungannya ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio rentabilitas modal sendiri lebih kecil dari 3% diberi nilai 25, untuk setiap kenaikan rasio 1% nilai ditambah 25 sampai dengan maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% dan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.19
Standar Perhitungan untuk Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

3) Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional yaitu partisipasi Netto dibandingkan dengan Beban usaha dan ditambah dengan Beban Perkoperasian, perhitungan rasio kemandirian operasional ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil atau sama dengan 100% diberi nilai 0, dan untuk rasio lebih besar dari 100% diberi nilai 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 4% dan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.20
Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
≥ 100	100	4	4

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

7. Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota.

Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 rasio, diantaranya :

1) Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto ialah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya maka semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup badan pokok dan partisipasi netto.

Pengukuran rasio partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar 75% nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 7% dan diperoleh skor penilaian

Tabel 2.21
Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75

$25 < x < 50$	50	7	3,50
$50 < x < 75$	75	7	5,25
> 75	100	7	7

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

2) Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya maka semakin baik. PEA didapatkan dari membandingkan promosi ekonomi anggota terhadap simpanan pokok dan ditambah simpanan wajib.

Pengukuran rasio promosi ekonomi (PEA) ditetapkan sebagai berikut :

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai 0 dan untuk rasio antara 5 hingga 7,5 diberi nilai 50. Untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai ditambah dengan 25 sampai dengan nilai maksimum 100.
- b) Nilai dikalikan dengan bobot 3% dan diperoleh skor penilaian.

Tabel 2.22
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 < x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 < x < 10$	75	3	2,25
> 10	100	3	3

Sumber : Peraturan Menteri KUKM No.14/Per/MKUKM/XII/2009

1.1.4. Penetapan Kesehatan

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 7 komponen diatas sehingga diperoleh skor secara keseluruhan. Ini dimaksud untuk menetapkan nilai atau predikat dari tingkat kesehatan KSP/USP, pada Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.14/Per/M.KUKM/XII/2009 tingkat kesehatan dibagi beberapa jenis yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus.

Yang dijelaskan secara rinci pada tabel berikut ini :

Tabel 2.23
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

SKOR	PREDIKAT
$80 \leq x < 100$	SEHAT
$60 \leq x < 80$	CUKUP SEHAT
$40 \leq x < 60$	KURANG SEHAT
$20 \leq x < 40$	TIDAK SEHAT
< 20	SANGAT TIDAK SEHAT

Sumber : Peraturan Menteri KUKM
No.14/M.KUKM/XII/2009

1.2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan oleh penulis yakni pendekatan *empiris* dan pendekatan *struktural*. Yang dimaksud pendekatan *empiris* yaitu pendekatan yang mempergunakan sumber data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari responden atau tempat yang diteliti hal ini bertujuan agar data yang diperoleh *valid* dan dapat diuji kebenarannya. Sedangkan pendekatan *struktural* ialah pendekatan analisis data dengan memperhatikan elemen – elemen dari suatu struktur dan mempelajari hubungan satu sama lainnya.